

KLIPING

KOMPAS, SELASA, 25 OKTOBER 2022

Bantalan Sosial

Perlu Perhatian Kemiskinan

Apresiasi positif kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial masih dihadapkan pada persoalan penanggulangan kemiskinan. Jaminan perlindungan sosial dan kestabilan harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas.

SURVEI KEPEMIMPINAN NASIONAL

MB Dewi Pancawati

Setelah genap tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial masih stabil positif. Dari Hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas periode Oktober 2022, kepuasan di bidang ini bergerak tipis sebesar 0,6 persen dibanding Juni 2022.

Masih tingginya apresiasi publik atas kerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, antara lain, ditopang oleh meningkatnya apresiasi pada indikator pelayanan kesehatan sebesar 1,5 persen menjadi 78,4 persen dari 76,9 persen pada survei sebelumnya. Kepuasan publik atas indikator kesehatan ini tertinggi dari semua indikator bidang kesejahteraan sosial.

Kepuasan publik atas bidang kesejahteraan sosial berfluktuasi selama tiga tahun periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, tak dapat dimungkiri, terpaan pandemi Covid-19 pada dua tahun pertama pemerintahan Jokowi-Amin membuat upaya pemerintah untuk menyecah terakan rakyatnya semakin berat.

Kepuasan publik atas kinerja di bidang ini tahun 2020 tercatat di angka 61,6 persen atau terendah sepanjang tiga tahun ini. Hal ini tidak lepas dari beban berat pemerintah dalam memulihkan kondisi kesejahteraan rakyat akibat pandemi.

Sering meredanya kasus Covid-19 perlahan kondisi kesejahteraan sosial rakyat semakin membaik. Menginjak tahun ketiga, kinerja pemerintah atas kerja bidang kesejahteraan sosial mendapat apresiasi hampir tiga perempat responden. Bahkan, tertinggi mencapai 78,3 persen pada survei Januari 2022.

Apresiasi yang bertahun positif ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah menangani penyebaran Covid-19, salah satunya melalui kebijakan pemberian vaksin. Selain kesehatan, aspek pendidikan juga mendapat apresiasi cukup signifikan dari publik.

Dalam empat bulan terakhir, upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan naik 3,4 poin menjadi 72,6 persen, bahkan melebihi kepuasan tertinggi sebelumnya pada survei Januari 2022. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendorong pembelajaran tatap muka 100 persen serta berbagai kebijakan melalui program Merdeka Belajar sangat berkontribusi pada kepuasan publik.

KLIPING

Kemiskinan

Meski aspek kesehatan dan pendidikan menunjukkan tren positif, pemerintah masih menghadapi tantangan berat dalam aspek penanggulangan kemiskinan dan pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan.

Kepuasan publik atas upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan turun signifikan hingga 7,6 persen poin dibanding survei periode sebelumnya. Hanya 41,4 persen responden yang mengaku puas atas kinerja pemerintah dalam aspek ini. Kondisi tersebut berada di titik terendah sepanjang pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebenarnya persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 20,05 persen sudah menurun 0,39 poin dibanding September 2021 dan menurun 0,94 poin dibandingkan dengan Maret 2021.

Namun, problem kemiskinan masih dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini tak lepas dari dampak persoalan dan kebijakan di bidang ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada September 2022 yang berimbas pada kenaikan harga bahan-bahan pokok menjadi pemicu.

Langkah strategis

Tantangan pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya pun semakin berat. Upaya yang di-

lakukan dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menopang daya beli masyarakat ternyata masih belum memuaskan rakyat.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan tiga jenis bantuan sosial untuk menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni BLT BBM sebesar Rp 600.000 untuk 20,65 juta keluarga dengan total anggaran Rp 12,4 triliun yang diberikan dua kali untuk September sampai Desember. Lalu, bantuan subsidi upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan sebanyak Rp 600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk para pelaku transportasi, di antaranya para pengemudi angkutan umum, ojek daring, ojek pangkalan, nelayan, dan pelaku UMKM senilai Rp 2,17 triliun.

Tambahan bansos yang diberikan pemerintah dalam pengalihan BBM bersubsidi sebesar Rp 24,17 triliun tersebut diharapkan dapat menekan laju angka kemiskinan. Namun, kepuasan yang ditunjukkan masyarakat justru merosot hingga 8,5 persen ketimbang kepuasan pada survei Juni 2022.

Meskipun sejumlah program bantuan sosial telah digulirkan, hal itu belum mampu melepaskan warga miskin dari jerat kemiskinan. Perlindungan sosial yang disediakan belum maksimal berdampak terhadap penurunan kemiskinan yang dirasakan langsung oleh publik.

Menghadapi kondisi tersebut, di dua tahun sisa pemerintahan Jokowi-Amin, pemerintah harus mengambil langkah strategis agar tujuan menyejahterakan rakyat benar-benar terwujud. Menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok dan inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini mengingat persoalan ekonomi merupakan yang paling krusial.

(LITBANG KOMPAS)